

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT
(Studi kasus: Masyarakat Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

FADHLULLAH

NIM. 170801061

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT
(Studi kasus: Masyarakat Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

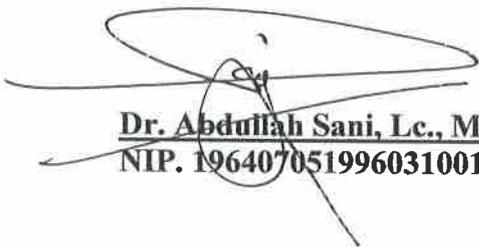
FADHLULLAH
NIM. 170801061

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A
NIP. 196407051996031001


Ramzi Murziqin M.A
NIP. 198605132019031006

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT
(Studi kasus: Masyarakat Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

FADHLULLAH
NIM. 170801061

Pada Hari / Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
7 Rabiul Awal 1445 H

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdullah Sam Lc, M.A.
NIP. 196407051996031001

Ramzi Murziqin, M.A.
NIP.198605132019031006

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Said Amirulkamar, M.M, M.Si.
NIP. 196110051982031007

Arif Akbar, M.A.
NIP. 199110242022031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP.197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhlullah
NIM : 170801061
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bagi Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten
Pidie)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Fisip dan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 23 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



Fadhlullah

ABSTRAK

Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pidie sebagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi di lapangan dan melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan instrumen penelitian. Hasil penelitian menggambarkan variasi dalam kriteria seleksi penerima manfaat antar desa, mencerminkan adaptasi program terhadap realitas sosial dan ekonomi setiap komunitas. Penerapan BLT juga dihadapi dengan beberapa kendala seperti keluhan masyarakat terkait seleksi penerima BLT dan keterlambatan penyaluran dana, namun dari segi dampak positif program BLT ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, dan penguatan ikatan sosial. Harapan masyarakat terhadap peningkatan dana dan partisipasi lebih besar dalam pengambilan keputusan menjadi sorotan. Program bantuan seperti BLT memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dari program yang telah terlaksanakan di Kabupaten Pidie, sejauh ini masyarakat tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan, hal ini juga disebabkan oleh bantuan yang didapatkan perorangan tidak seberapa dan tidak mungkin menutup seluruh kebutuhan harian sehingga masyarakat tetap perlu aktif untuk bekerja secara mandiri. Penelitian ini menyarankan perluasan koordinasi antarpihak terkait dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi sebagai langkah menuju efektivitas dan keadilan yang lebih baik dalam implementasi Program BLT di Kabupaten Pidie.

Kata Kunci : Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kabupaten Pidie, Kebijakan Pemerintah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Pidie)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyampaian penghargaan yang tulus dan tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Abdullah Sani Lc. M.A., sebagai pembimbing utama, dan Bapak Ramzi Murziqin M.A sebagai pembimbing kedua, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai. Terima kasih pula kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Penasehat Akademik, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan atas masukan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis.

Juga, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian layanan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan serta Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah atas pinjaman buku yang menjadi sumber penting dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa, terima

kasih kepada semua yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan menyokong pendidikan saya hingga ke perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Saya sadar bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan pembaca lainnya. Kita berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan, taufiq, dan hidayah-Nya untuk kita semua..



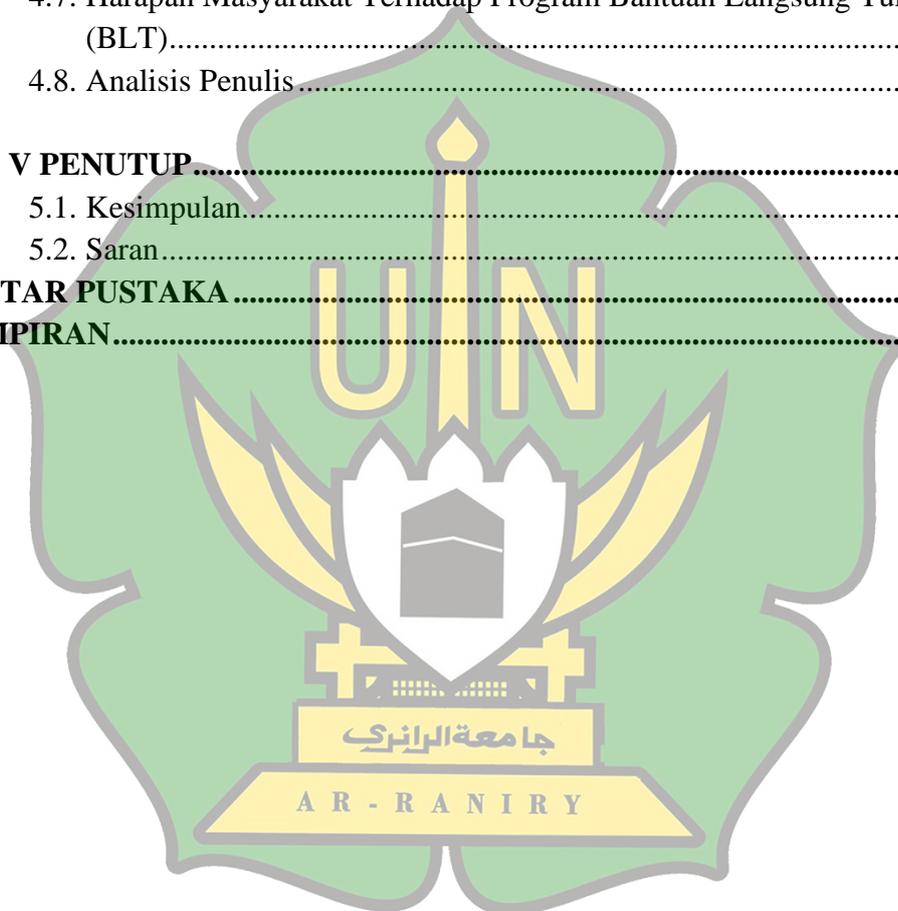
Banda Aceh, 23 Oktober 2023
Penulis,

Fadhlullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian terdahulu.....	8
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Implementasi	14
2.2.2. Kebijakan Publik.....	16
2.2.3. Implentasi Kebijakan.....	25
2.2.4. Model Implemtasi Edward III	30
2.2.5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	34
2.2.6. Kemiskinan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Pendekatan Penelitian	44
3.2. Fokus Penelitian	44
3.3. Lokasi Penelitian	44
3.4. Jenis dan Sumber Data	44
3.5. Informan Penelitian	45
3.6. Teknik Pengumpulan Data	46
3.7. Teknik Analisis Data	48

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE	50
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
4.2. Deskripsi Responden.....	51
4.3. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	52
4.4. Kendala Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	55
4.5. Manfaat dan Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).	56
4.6. Penilaian Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	59
4.7. Harapan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	60
4.8. Analisis Penulis	62
BAB V PENUTUP	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel informan.....	45
Tabel 4. 1. Deskripsi Responden Perangkat Desa.....	52
Tabel 4. 1. Deskripsi Responden Masyarakat.....	52



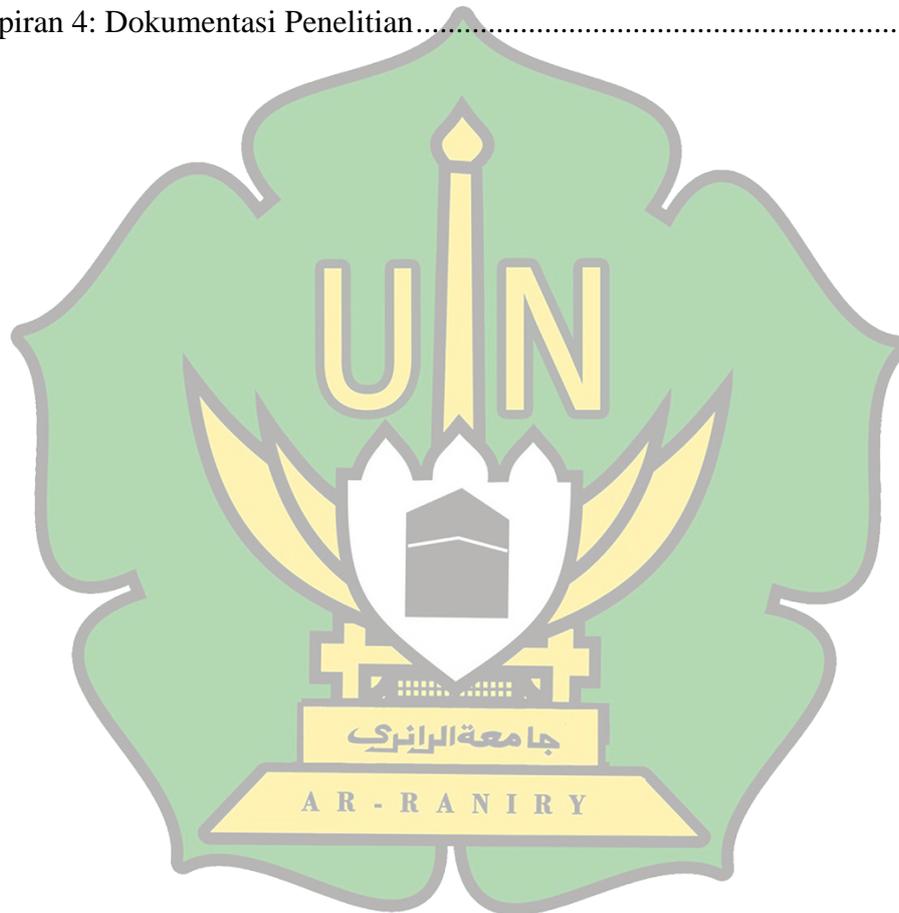
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model dampak implementasi Edward.....	32
Gambar 4. 1. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pidie tahun 2014-2020	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK (Surat Keputusan) Petunjukan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup.....	69
Lampiran 3: Panduan Wawancara	70
Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai sebuah negara kesatuan, menegakkan pemerintahannya dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip ini bertujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan adalah tingkat kecerdasan dan keadilan bagi masyarakatnya, selain dari aspek kemakmuran dan kesejahteraan material. Perhatian terhadap kesehatan penduduk juga merupakan tanggung jawab penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.¹

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Istilah kemiskinan merujuk pada kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi, termanifestasi dalam rendahnya tingkat pendapatan, kesulitan akses terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah vital dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan ini.

Upaya meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup layak dan berkembang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi kemiskinan, seperti menciptakan program-program dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi tersebut.

¹ Ahmad. *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka. 2020

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang kuat dalam memberantas kemiskinan, dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kerja keras untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden No. 96 tahun 2015, serta keputusan Menteri Sosial RI 21/HUK/2017 tentang penetapan jumlah keluarga penerima manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2017.

Sejalan dengan upaya tersebut, Keputusan Gubernur mengenai alokasi anggaran untuk program beras sejahtera bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Pidie, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak dasar warga negara, terutama dalam mengatasi kemiskinan. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem desentralisasi. Hal ini mengakibatkan pengalihan sebagian besar kekuasaan dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan dana bantuan sosial.

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita tidak boleh berdiam diri melihat kondisi tersebut. Kita perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial merujuk pada bantuan dalam bentuk barang atau uang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan². Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang dilakukan

² Asmaroini, Ambiro Puji. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Bagi Siswa di Era Globalisasi. *Jurnal Oleh Mahasiswa*. 2017.

oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk melindungi penerima bantuan dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan Sosial (disingkat sebagai Bansos) menjadi fokus perhatian publik karena memiliki tujuan penting dalam mendukung tugas pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial, serta memperhitungkan aspek politik dalam konteks yang lebih luas. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diatur dalam Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Salah satu perubahan dalam regulasi tersebut adalah penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa dianggap lebih mampu memahami prioritas kebutuhan masyarakat karena keterlibatan mereka yang lebih langsung, berbeda dengan Pemerintah Kabupaten yang menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengelola BLT-DD sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.³

Pemerintah telah lama memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Indonesia sebagai upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban, dan meningkatkan tingkat kehidupan warga negara yang kurang mampu. Ini sejalan dengan konsep welfare state, di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.

Masalah yang muncul dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait dengan pelaksanaan tahap pertama BLT Dana Desa di beberapa wilayah

³ Nur Fitra Tsani. *Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Laringgi kabupaten Soppeng*. 2022.

menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang sebelumnya terjadi. Beberapa masalah yang timbul mencakup keterlambatan pencairan BLT Dana Desa di Kabupaten Pidie, yang mengakibatkan protes dari masyarakat yang datang ke kantor kepala desa untuk meminta kepastian terkait pencairan dana.

Meskipun BLT merupakan bagian penting dari jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, kepala desa menghadapi berbagai tantangan dalam distribusi bantuan tersebut. Tantangan tersebut meliputi masalah dalam pendataan warga yang berhak menerima bantuan, keterbatasan dana desa karena banyaknya warga yang membutuhkan, timbulnya kecemburuan sosial, tingkat kepercayaan kepada kepala desa, dan penolakan dari desa yang enggan menyalurkan Dana Desa. Tantangan-tantangan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan baik dari kepala desa, aparat desa, maupun masyarakat setempat.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie mencapai 16,64 persen, atau setara dengan sekitar 72.406 individu dari total penduduk. Oleh karena itu, hadirnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa yang diterbitkan oleh pemerintah, yang mengalokasikan sekitar 25% dari total anggaran dana desa untuk bantuan langsung, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 300.000 per kepala rumah tangga, diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie. Namun demikian, dampak dari bantuan ini terhadap tingkat kemiskinan belum menunjukkan penurunan atau peningkatan yang signifikan.

Secara prinsip, bantuan ini dimaksudkan sebagai tambahan dari rangkaian program jaring pengaman sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Diskon Listrik. Yang

membedakannya, skema BLT Dana Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk secara partisipatif menentukan calon penerima bantuan melalui proses Musyawarah Desa. Harapannya, masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan dana tersebut secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer mereka. Berdasarkan masalah yang terjadi di atas yang membuat penulis merasa penasaran sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merumuskan 3 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie?
2. Apakah ada kendala dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie oleh pemerintah sekitar?
3. Bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi pada Kabupaten Pidie setelah beberapa kali menerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?

1.3. Tujuan Penelitian

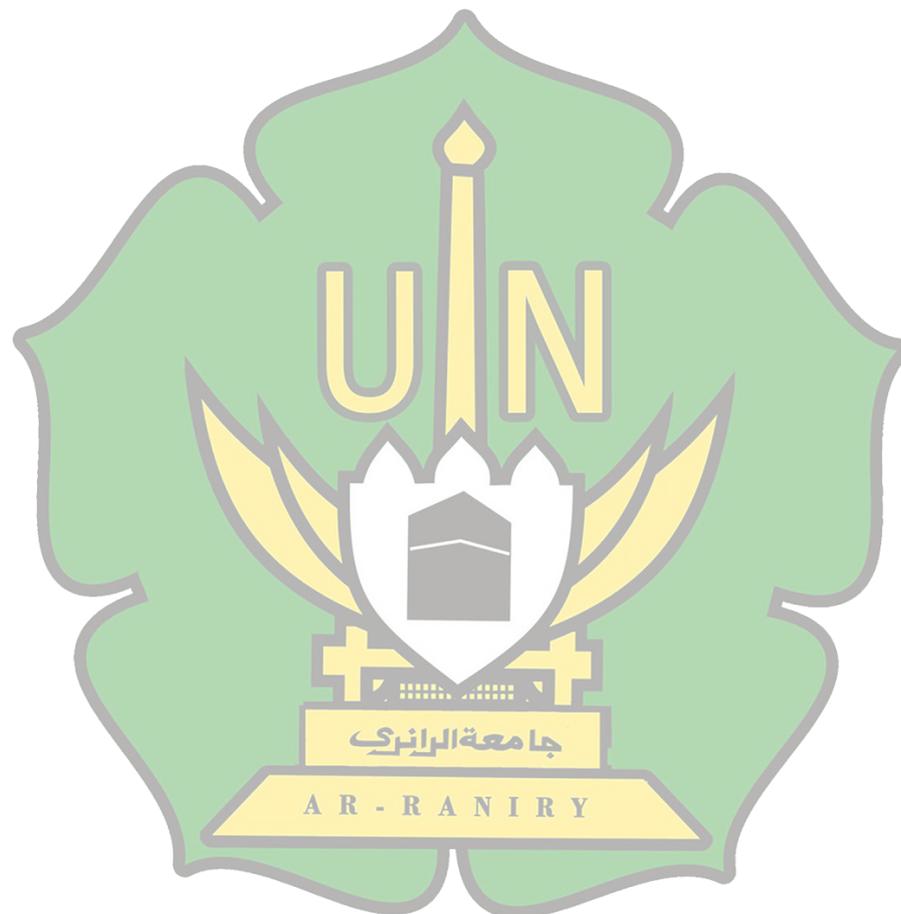
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan mengevaluasi implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pidie.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian implementasi BLT, dapat dievaluasi efektivitas program dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pidie. Dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, diharapkan dapat meningkatkan daya beli mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.
2. BLT yang diterima masyarakat miskin dapat membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan memiliki sumber daya finansial yang lebih, mereka dapat membeli obat-obatan, melakukan pemeriksaan kesehatan, atau membayar biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.
3. Dengan adanya bantuan langsung tunai, keluarga miskin di Kabupaten Pidie dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ini termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin juga dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Dengan memiliki lebih banyak uang yang tersedia, masyarakat miskin dapat meningkatkan daya beli mereka di pasar lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi para pedagang dan pengusaha lokal.
5. Dengan merasakan manfaat langsung dari program BLT, diharapkan masyarakat miskin akan merasa lebih terlibat secara sosial dan politik. Mereka mungkin akan lebih aktif dalam kegiatan masyarakat, serta memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik,

seperti pemilihan umum atau musyawarah desa, untuk memperjuangkan kepentingan mereka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah:

1. Zainul Arifin (2014), judul “pembangunan dan Problem sosial di perkotaan (Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya)”. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan kota Surabaya menjadi latar belakang yang penting untuk memahami dinamika kemiskinan di tengah perkembangan kota. Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan industri. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat dampak sosial yang perlu diperhatikan, termasuk masalah kemiskinan yang masih menghantui sebagian masyarakatnya. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Wonokromo. Wonokromo merupakan salah satu wilayah di Surabaya yang menunjukkan karakteristik khas masyarakat perkotaan, dengan segala kompleksitas dan tantangannya. Analisis yang dilakukan oleh Zainul Arifin mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Wonokromo serta bagaimana pembangunan kota Surabaya mempengaruhi kondisi tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Wonokromo sangatlah bervariasi, mulai dari masalah akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga kurangnya kesempatan kerja yang layak. Selain itu,

infrastruktur yang kurang memadai dan kurangnya akses terhadap fasilitas publik juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, infrastruktur, dan kebijakan publik yang relevan. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada pemahaman terhadap masalah kemiskinan di tingkat lokal, tetapi juga dalam merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting. Diperlukan kebijakan yang holistik dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonokromo dan masyarakat perkotaan lainnya di Surabaya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara pembangunan kota dan masalah sosial, khususnya kemiskinan. Dengan memahami dinamika kompleks antara pembangunan dan problem-problem sosial yang muncul, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan secara keseluruhan.⁴

2. Winarti wayan (2020), dengan judul “Hasil Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar” Salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah proses penyaluran dana bantuan sosial. Penyaluran dana bantuan sosial merupakan tahapan kritis dalam implementasi kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat. Dalam konteks Kabupaten Gianyar, proses penyaluran dana bantuan sosial mungkin melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, lembaga swadaya

⁴Zainul Arifin. *pembangunan dan Problem sosial di perkotaan (Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya)*. 2014

masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas proses penyaluran tersebut guna memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu, dalam skripsi ini juga dibahas mengenai jenis-jenis bantuan sosial yang disalurkan di Kabupaten Gianyar. Bantuan sosial dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari bantuan tunai, sembako, hingga bantuan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Analisis mengenai jenis-jenis bantuan sosial ini penting untuk memahami ragam kebutuhan masyarakat penerima manfaat serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, skripsi ini juga menyoroti hasil atau dampak yang telah dicapai melalui penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten Gianyar. Dampak dari kebijakan bantuan sosial dapat bervariasi, mulai dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan partisipasi dalam pembangunan lokal. Evaluasi terhadap dampak kebijakan bantuan sosial menjadi penting untuk menilai apakah program tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya, aspek evaluasi yang krusial dalam penelitian ini adalah analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana bantuan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi faktor internal seperti kapasitas instansi terkait, sistem administrasi yang efisien, hingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat penerima manfaat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial, dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan tersebut di masa mendatang. Selain itu, skripsi ini juga memberikan gambaran

tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyaluran dana bantuan sosial di Kabupaten Gianyar. Tantangan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari kendala teknis dalam proses administrasi, hingga tantangan sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan keberlanjutan program bantuan sosial di masa depan.⁵

3. Nafida Arumdani (2021), dengan judul “efektifitas bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) di desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”. Salah satu aspek penting yang dikaji dalam penelitian ini adalah proses implementasi BLTDD di Desa Mojoruntut. Proses implementasi ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi penerima manfaat, mekanisme penyaluran dana, hingga pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat. Dengan memahami proses implementasi secara menyeluruh, dapat dievaluasi sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, skripsi ini juga mengkaji dampak dari BLTDD terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Mojoruntut. Dampak dari program ini dapat bervariasi, mulai dari peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Analisis terhadap dampak program ini penting untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, skripsi ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas BLTDD di Desa Mojoruntut. Faktor-faktor tersebut

⁵ Winarti wayan. *Hasil Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar*. 2020

dapat meliputi faktor internal seperti kapasitas pemerintah desa dalam mengelola program, hingga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat penerima manfaat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan dampak program tersebut di masa mendatang. Selain itu, dalam skripsi ini juga dibahas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi BLTDD di Desa Mojaruntut. Tantangan tersebut dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari kendala teknis dalam proses administrasi, hingga tantangan sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program bantuan sosial. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan keberlanjutan program BLTDD di masa depan.⁶

4. Riski ananda (2021), dengan judul “efektifitas program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kotawaringan barat provinsi kalimantan tengah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan dengan efektif, terutama jika dilihat dari indikator efektivitas menurut Duncan yang semuanya telah terpenuhi. Namun, terdapat sedikit kendala dalam pendataan karena sifat mendadak dari bantuan tersebut, yang mengharuskan pemenuhan persyaratan dalam waktu singkat.⁷

⁶ Nafida Arumdani. *efektifitas bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) di desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo*. 2021

⁷ Riski ananda. *efektifitas program bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Kotawaringan barat provinsi kalimantan tengah*. 2021

5. Nur Fitra Tsania (2022). Dengan judul “Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di desa Laringgi kabupaten Soppeng” Desa Laringgi, yang terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili kondisi daerah pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program BLT telah diterapkan di tingkat desa dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah proses implementasi program BLT di Desa Laringgi. Proses implementasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi penerima manfaat, penyaluran dana, hingga pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat. Dengan memahami proses implementasi secara menyeluruh, dapat dievaluasi sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, skripsi ini juga mengkaji dampak dari program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Laringgi. Dampak dari program ini bisa bervariasi, mulai dari peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan, hingga peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Analisis terhadap dampak program ini penting untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, skripsi ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BLT di Desa Laringgi. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kapasitas pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi selama pelaksanaan program. Dengan memahami faktor-faktor ini, dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program

BLT di masa mendatang. Tidak hanya itu, skripsi ini juga memberikan gambaran tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program BLT di Desa Laringgi. Tantangan tersebut mungkin meliputi kendala teknis dalam proses administrasi, keterbatasan sumber daya, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Memahami tantangan-tantangan ini penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang efektivitas kebijakan bantuan sosial di tingkat desa. Dengan mengevaluasi proses implementasi, dampak yang dicapai, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta tantangan yang dihadapi, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui upaya evaluasi yang berkesinambungan, diharapkan implementasi program BLT di Desa Laringgi dan daerah-daerah lainnya dapat terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.⁸

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implantation*". Dalam kamus Webster, implementasi diartikan sebagai "*to provide the means for carrying out*" (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)

⁸ Ibid.

dan "to give practical effect to" (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).⁹

Dalam buku yang berjudul "Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara", implementasi dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat, pemerintah, atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.¹⁰

Implementasi, dalam konteks yang dikemukakan di atas, dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan program-program yang telah direncanakan, sejalan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Badan-badan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintah dengan dampak yang diharapkan terhadap warga negaranya. Namun, dalam praktiknya, badan-badan tersebut seringkali dihadapkan pada kompleksitas tugas yang diamanahkan serta undang-undang yang mengaturnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan terkait tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak. Dengan demikian, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang bisa

⁹Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004

¹⁰ Ibid.

berbentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan penting dari badan peradilan.¹¹

Implementasi dapat dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan dasar, yang dapat berbentuk undang-undang maupun perintah atau keputusan yang penting, termasuk keputusan dari badan peradilan. Proses implementasi ini melibatkan serangkaian tahapan tertentu, dimulai dari pengesahan undang-undang, yang kemudian menghasilkan kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan, dan berlanjut hingga terjadi perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi juga bisa dianggap sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci.

2.2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam bentuk pengaturan maupun keputusan. Dalam konteks praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang mencakup langkah-langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Peran dan fungsi aparat pemerintah, yang dikenal sebagai birokrasi, turut memainkan peran penting dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut James E. Anderson, "Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat." Ini menggambarkan bahwa kebijakan publik mengatur bagaimana nilai-nilai dan sumber daya dialokasikan secara resmi untuk seluruh anggota masyarakat. Anderson juga

¹¹ Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.

menyatakan bahwa, "Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan pemerintah dan pejabatnya." Hal ini menekankan bahwa kebijakan publik berasal dari badan-badan pemerintah serta pejabatnya yang mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹²

Terdapat beberapa definisi tentang kebijakan menurut berbagai teori, di antaranya:

1. Menurut Ealau dan Pewit, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Definisi ini menekankan pada keberlakuan, konsistensi, dan repetisi dari kebijakan yang telah dibuat.
2. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Definisi ini menyoroti prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari kebijakan serta arah yang dituju oleh kebijakan tersebut.
3. Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan pada perencanaan, konsistensi, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Penetapan kebijakan seharusnya didorong oleh orientasi pada pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi. Dalam konteks Negara demokrasi, pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan semua golongan masyarakat dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional. Setiap

¹² Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

¹³ *Konsep Kebijakan Publik*, diakses di konsep-kebijakan-publik.html, diakses pada 22 Januari 2023

lembaga atau instansi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, kebijakan juga sering kali muncul karena dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu atau elit politik. Meskipun salah satu fungsi politik adalah pembuatan kebijakan untuk menangani masalah sosial atau sebagai respons terhadap pergantian kekuasaan, namun terkadang kebijakan tersebut dapat menjadi alat yang digunakan untuk memenuhi kepentingan sempit dari segelintir kalangan.

Hal ini dapat menyebabkan kebijakan menjadi kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan institusi terkait untuk memastikan bahwa pembuatan kebijakan didasarkan pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih melayani kepentingan publik secara adil dan merata.

Pendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang berbeda dengan sektor swasta adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Sektor publik cenderung lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu dibandingkan dengan sektor swasta.
2. Sektor publik seringkali menghadapi lebih banyak masalah dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya dibandingkan dengan sektor swasta.

¹⁴ Aditama, T.Y. *Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi 2*. Penerbit. Universitas Indonesia, Jakarta. 2003

3. Sektor publik mempekerjakan orang-orang dengan motivasi yang sangat beragam.
4. Sektor publik lebih memperhatikan upaya mempertahankan peluang dan kapasitas.
5. Sektor publik lebih fokus pada kompensasi atas kegagalan pasar.
6. Sektor publik lebih sering melakukan aktivitas yang memiliki signifikansi simbolik.
7. Sektor publik memiliki standar yang lebih ketat dalam menjaga komitmen dan legalitas.
8. Sektor publik memiliki lebih banyak peluang untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran.
9. Sektor publik beroperasi demi kepentingan publik.
10. Sektor publik harus mempertahankan tingkat dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Pengertian kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, mencakup segala keputusan atau ketetapan yang diambil oleh pemerintah, baik itu tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, dan dapat membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakatnya. Analisis kebijakan sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan atau pelaksanaannya, serta untuk menentukan apakah kebijakan tersebut efektif dan sesuai dengan aturan yang ada.

Konsep kebijakan publik melibatkan serangkaian aktivitas tertentu dan kumpulan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang spesifik. Ini mencakup pola aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan berbagai masalah dan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan

demikian, konsep kebijakan publik berkaitan dengan tujuan dan pola aktivitas pemerintahan dalam menangani berbagai masalah, serta mencakup rencana untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁵

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.

Perbedaan antara keputusan dan kebijakan terletak pada ruang lingkungnya serta kompleksitas pelaksanaannya:

- a. Kebijakan memiliki ruang lingkup yang lebih besar dibandingkan dengan keputusan. Kebijakan melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
- b. Meskipun dalam keputusan tunggal mungkin terdapat langkah-langkah tertentu yang rumit bahkan kritis, terutama pada saat penentuan pilihan terbaik di antara berbagai macam pilihan yang tersedia, namun kompleksitas pelaksanaan kebijakan biasanya lebih besar karena melibatkan banyak aktor dan organisasi.
- c. Konsep keputusan sering dikaitkan dengan pembuat keputusan (decision maker), sementara kebijakan melibatkan banyak pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan yang kompleks.

Dengan demikian, kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas, kompleksitas pelaksanaan yang lebih besar, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sedangkan keputusan lebih terfokus pada tindakan atau langkah tunggal yang diambil oleh individu atau organisasi tertentu. Bahkan dalam literatur kebijakan publik, kebijakan sering kali tidak dapat secara tegas dibedakan dari administrasi. Salah satu alasan yang sering diajukan adalah

¹⁵*Konsep Kebijakan Publik*, diakses di <http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/konsep-kebijakan-publik.html>, diakses pada 22 Januari 2023

bahwa para administrator sering hanya berperan sebagai penasihat bagi para pemimpin dalam hal-hal kebijakan yang kompleks dan penting, termasuk penentuan tujuan dan prioritas, alokasi sumber daya, serta strategi-strategi umum yang ingin dicapai oleh pemerintah. Administrasi pemerintahan umumnya dianggap sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin. Namun, dalam konteks modern, peran administrator telah berkembang menjadi lebih kompleks, dengan lebih banyak tanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Administrator sering kali terlibat dalam proses penyusunan kebijakan dari awal hingga akhir, memberikan masukan yang berharga kepada para pembuat kebijakan.

Salah satu peran utama administrator adalah sebagai penasihat bagi para pemimpin. Mereka membantu dalam menganalisis masalah-masalah kebijakan yang kompleks dan memberikan saran tentang langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Para administrator juga berperan dalam membantu menentukan tujuan-tujuan jangka panjang dan prioritas-prioritas yang harus dikejar oleh pemerintah.

Selain itu, administrator juga terlibat dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Mereka harus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan dengan bijaksana, dengan memperhatikan kebutuhan mendesak serta kepentingan jangka panjang masyarakat. Ini melibatkan pengelolaan anggaran, pengadaan personel, serta pengelolaan infrastruktur yang efisien.

Masalah kebijakan juga seringkali memerlukan strategi-strategi yang kompleks dan menyeluruh untuk diselesaikan. Dalam hal ini, administrator

memiliki peran kunci dalam membantu merumuskan strategi-strategi tersebut dan memastikan bahwa implementasinya berjalan sesuai rencana. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi-strategi yang diusulkan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Namun demikian, perbedaan antara kebijakan dan administrasi tetaplah penting. Kebijakan merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sementara itu, administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, termasuk proses-proses operasional dan administratif yang terlibat. Dalam konteks modern, hubungan antara kebijakan dan administrasi menjadi semakin kompleks dan saling terkait. Administrasi yang efektif memerlukan dasar kebijakan yang kuat, sementara kebijakan yang baik memerlukan implementasi yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi para administrator dan pembuat kebijakan untuk bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah..

2. Kebijakan melibatkan perilaku dan harapan. Kebijakan yang efektif tidak boleh mengabaikan tindakan dari para pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima kebijakan.
3. Kebijakan juga mencakup aksi atau kelalaian. Implementasi kebijakan bisa mencakup kesalahan tak disengaja serta keputusan sengaja untuk tidak bertindak.
4. Selain itu, kebijakan sering memiliki hasil yang diharapkan, yang dapat diprediksi atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami kebijakan secara

menyeluruh, kita perlu memperhatikan kedua hasil yang diinginkan dan yang benar-benar terjadi.

5. Setiap kebijakan perlu memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Meskipun tujuan dari suatu kebijakan bisa berubah atau dilupakan seiring berjalannya waktu.
6. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu dan bersifat dinamis. Umpan balik dari implementasi kebijakan bisa mengubah tujuan, arah, atau organisasi yang melaksanakannya.
7. Kebijakan melibatkan hubungan antar-organisasi dan intra-organisasi.
8. Kebijakan Negara terkait dengan peran kunci lembaga pemerintah, meskipun tidak secara eksklusif.
9. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sering dilakukan secara subjektif, dengan menggunakan lensa konseptual yang dimiliki individu.¹⁶

Terdapat siklus atau tahapan-tahapan pembuatan kebijakan dalam proses kebijakan publik, menurut Willam N. Dunn adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Penyusunan Agenda (Perumusan Masalah)

Proses di mana masalah-masalah yang dianggap penting diidentifikasi dan ditempatkan dalam agenda kebijakan. Ini melibatkan mengidentifikasi asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab masalah, menetapkan tujuan yang mencerminkan pandangan yang beragam, dan merancang peluang kebijakan baru..

2. Formulasi Kebijakan (Peramalan)

¹⁶ Jeane Elisabeth Langkai, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang, Jawa Timur: CV Seribu Bintang, 2019), hal. 25-39

¹⁷ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 172-173

Masalah-masalah yang ada dalam agenda kebijakan dianalisis oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefinisikan dan dicari solusi terbaik untuk mereka. Peramalan memberikan informasi relevan tentang kemungkinan hasil masa depan dari berbagai alternatif kebijakan yang mungkin diambil.

3. Adopsi Kebijakan (Rekomendasi)

Pilihan kebijakan yang tersedia kemudian dipilih, dengan mempertimbangkan urgensi masalah yang dihadapi. Rekomendasi didasarkan pada pengetahuan tentang manfaat dan biaya dari berbagai alternatif kebijakan, yang telah diestimasi melalui peramalan. Proses adopsi memberikan legitimasi kepada kebijakan dan memberi otoritas pada proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik.

4. Implementasi Kebijakan (Pemantauan)

Langkah-langkah dilakukan untuk menerapkan kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi melibatkan penerapan kebijakan publik di masyarakat dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

5. Evaluasi Kebijakan (Penilaian)

Proses untuk mengevaluasi hasil atau kinerja kebijakan. Evaluasi tidak hanya menilai bagaimana masalah diselesaikan, tetapi juga mempertanyakan nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan.

2.2.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara umum mengacu pada pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, rencana, atau keputusan. Ini melibatkan tindakan atau aplikasi dari perencanaan yang telah disusun dengan matang dan jelas sebelumnya. Implementasi dilakukan ketika perencanaan telah menghasilkan kepastian dan kejelasan mengenai tujuannya.

Implementasi juga mencakup penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program, yang dapat menyebabkan masalah atau dampak terhadap hal-hal tertentu. Ini merupakan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada adat istiadat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan, yang menghasilkan otoritas acara, keuntungan, atau keluaran konkret. Sementara menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah aplikasi keputusan kebijakan dasar, sering kali dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan badan peradilan. Ini melibatkan identifikasi masalah yang ingin diatasi, penetapan tujuan yang jelas, dan struktur atau proses implementasi yang terorganisir.¹⁹

Teori implementasi Edward III mengidentifikasi empat variabel atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah:

¹⁸ Akib, H. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. 2010

¹⁹ Ibid.

1. Sumberdaya (*Resources*): Variabel ini mencakup aspek-aspek seperti anggaran, personel, fasilitas, dan peralatan yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.
2. Komunikasi (*Communication*): Faktor komunikasi melibatkan aliran informasi dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan proses implementasi, serta memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antarstakeholder.
3. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*): Variabel ini mengacu pada struktur organisasi dan prosedur administratif yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan fleksibel dapat memudahkan pelaksanaan kebijakan, sementara struktur yang kompleks atau kaku mungkin menghambat implementasi.
4. Disposisi (*Dispositions*): Disposisi merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan motivasi para pelaku kebijakan yang terlibat dalam implementasi. Sikap yang positif, komitmen yang kuat, dan motivasi yang tinggi terhadap tujuan kebijakan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi. Sebaliknya, sikap yang negatif atau kurangnya dukungan dapat menjadi hambatan dalam proses implementasi.

Dengan memperhatikan dan mengelola empat variabel ini secara efektif, para pembuat kebijakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan mereka.²⁰

²⁰ Widodo, Prabowo.P, Dkk, 2011, Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek. Dengan UML, Graha ilmu, Yogyakarta.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan tindakan-tindakan konkret untuk menerapkan keputusan kebijakan yang telah diambil. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan implementasi kebijakan:

1. Pelaksanaan Tujuan: Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan yang dilakukan harus sejalan dengan visi dan misi kebijakan tersebut.
2. Proses Pelaksanaan: Implementasi kebijakan melibatkan serangkaian proses pelaksanaan, yang melibatkan berbagai pihak baik dari sektor publik maupun swasta. Proses ini termasuk perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Keterlibatan Stakeholder: Berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus terlibat secara aktif dan berkolaborasi. Ini termasuk pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum.
4. Penyediaan Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, personel, dan infrastruktur. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan mungkin tidak berhasil.
5. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan secara berkala. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan.
6. Keterbukaan dan Akuntabilitas: Proses implementasi kebijakan harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memahami dan

mengawasi jalannya proses tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kepentingan publik.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

Implementasi kebijakan, menurut Ripley dan Franklin, melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah undang-undang atau kebijakan dibuat dan diberlakukan. Beberapa poin kunci terkait dengan pandangan mereka tentang implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Otoritas Program: Setelah undang-undang atau kebijakan disahkan, program atau kebijakan tersebut memperoleh otoritas untuk dijalankan. Hal ini menetapkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pemerintah.
2. Aktivitas Beragam: Implementasi melibatkan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama birokrat, untuk memastikan program atau kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Ini termasuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, mengembangkan pedoman operasional, serta mengorganisir kegiatan pelaksanaan.
3. Pengadaan Sumber Daya: Salah satu aspek utama dari implementasi adalah pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan. Ini termasuk personel, peralatan, fasilitas, dan anggaran yang mencukupi.

²¹ Tirtayasa Serang, 2010), hal. 39-40, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/833/>, diakses pada 20 Agustus 2021

4. Pengembangan Pedoman Operasional: Badan pelaksana mengembangkan pedoman operasional yang konkret untuk menjalankan program atau kebijakan. Ini mencakup regulasi, rencana, dan desain program yang akan diimplementasikan.
5. Organisasi Kegiatan: Badan pelaksana harus mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan struktur birokrasi yang sesuai dan menetapkan rutinitas operasional untuk mengelola beban kerja yang ada.²²

Implementasi kebijakan, menurut Mazmanian dan Sabatier, melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang telah diambil oleh badan-badan pemerintahan. Beberapa poin penting terkait dengan pandangan mereka tentang implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Keputusan Kebijakan Dasar: Implementasi melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang umumnya disampaikan dalam bentuk undang-undang. Namun, keputusan tersebut juga bisa berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan dari badan penelitian.
2. Identifikasi Masalah dan Struktur Implementasi: Keputusan kebijakan mengidentifikasi secara tegas masalah yang ingin dicapai serta berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Ini menetapkan landasan bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
3. Tahapan Implementasi: Proses implementasi dimulai setelah tahapan-tahapan tertentu, seperti pengesahan undang-undang. Output dari kebijakan tersebut berupa pelaksanaan keputusan oleh badan-badan pelaksanaan yang ditunjuk.

²² Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hal. 145

4. Kesiediaan dan Dampak: Implementasi juga melibatkan kesiediaan kelompok-kelompok sasaran untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh badan pemerintahan. Dampak nyata dari implementasi ini akan dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang terpengaruh.
5. Perbaikan dan Revisi: Setelah implementasi dilakukan, proses ini juga mencakup upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan proses penting dalam kebijakan publik di mana keputusan kebijakan yang sudah ditetapkan dijalankan oleh berbagai aktor terkait setelah undang-undang atau kebijakan dasar telah disahkan. Tahapan-tahapan implementasi tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui keputusan-keputusan yang diambil. Dengan demikian, implementasi menjadi tahap kunci dalam menyusun kebijakan publik dan memastikan bahwa keputusan tersebut dapat berdampak nyata dalam masyarakat.

2.2.4. Model Implementasi Edward III

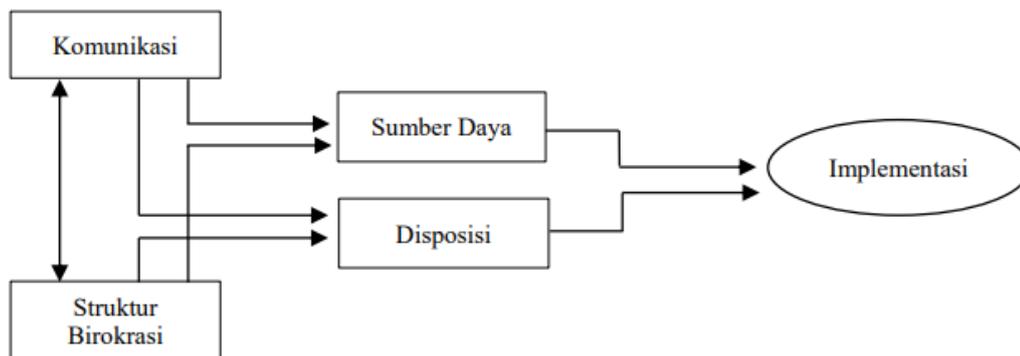
Edward C. George III mengembangkan model implementasi kebijakan yang menekankan pada dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Menurutnya, implementasi kebijakan dalam sistem informasi publik merupakan tahap di antara penetapan kebijakan sistem informasi publik dan konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap orang-orang yang terpengaruh. Edward juga mengidentifikasi beberapa masalah dalam administrasi publik,

khususnya kurangnya perhatian terhadap keputusan pembuat kebijakan yang berdampak pada kesuksesan implementasi.

Edward C. George III menyarankan agar fokus diberikan pada empat informasi utama untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Disposisi: Merujuk pada sikap dan kecenderungan individu atau kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Disposisi yang positif dari para pelaksana kebijakan dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.
2. Struktur Birokrasi: Menyatakan pentingnya struktur organisasi dan tata kelola dalam proses implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang efisien dan efektif dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan baik.
3. Sumber Daya: Mengacu pada ketersediaan dan alokasi sumber daya seperti dana, personil, dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan dengan sukses. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi: Menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik dapat memfasilitasi koordinasi yang efisien dan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan proses implementasi.²³

²³ Adisasmita. Manajemen Pemerintah Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011



Gambar 2. 1 Model dampak implementasi Edward

Dari paparan Anda, tampaknya Anda telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang indikator keberhasilan implementasi program gampong sehat berdasarkan teori George C. Edward III, yang melibatkan empat variabel utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah ringkasan indikator keberhasilan implementasi program gampong sehat berdasarkan setiap variabel:²⁴

1. Komunikasi

- a. Transmisi: Efektivitas penyampaian kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat secara akurat dan tepat.
- b. Kejelasan: Keterbacaan tujuan dan metode pelaksanaan program kepada seluruh pihak terlibat.
- c. Konsistensi: Kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan program.

2. Sumber Daya:

- a. Staf: Ketersediaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program.

²⁴ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), hal. 250-254

- b. Informasi: Aksesibilitas terhadap informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program.
 - c. Kewenangan: Kemampuan pelaksana dalam menggunakan kewenangan yang diberikan untuk menjalankan program.
 - d. Fasilitas: Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.
3. Disposisi:
- a. Kognisi: Pemahaman yang cukup terhadap tujuan dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para pelaksana.
 - b. Arahan dan Tanggapan: Sikap dan respon pelaksana terhadap kebijakan yang harus dijalankan.
 - c. Intensitas Respons: Tingkat keseriusan dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan.
4. Struktur Birokrasi:
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP): Kejelasan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pelaksanaan program.
 - b. Fragmentasi: Koordinasi dan integrasi antara berbagai institusi atau unit terlibat dalam pelaksanaan program.

Dengan memantau dan mengevaluasi indikator-indikator di atas, dapat diukur sejauh mana implementasi program gampong sehat telah mencapai tujuan yang diinginkan serta sejauh mana keberhasilan implementasi tersebut. Ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau penyesuaian mungkin diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masa mendatang.

2.2.5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan tunai langsung merupakan inisiatif pemerintah yang diperkenalkan sebagai respons terhadap penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pengalihannya kepada golongan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia, dengan harapan mengurangi disparitas ekonomi. Melalui BLT ini, diharapkan distribusi kemakmuran dapat menjadi lebih merata di seluruh wilayah. Hingga saat ini, seleksi penerima BLT masih dilakukan secara manual, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi program ini telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam proses pengelolaan dana BLT oleh Badan Pusat Statistik.²⁵

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terbitlah kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada Oktober 2005 hingga Desember 2006 tanpa syarat, dengan target mencapai 19,2 juta keluarga miskin sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2004. Namun, ketika harga minyak dunia kembali meningkat pada tahun 2008, pemerintah kembali melaksanakan Program BLT seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.²⁶

BLT merupakan sebuah program yang diimplementasikan oleh Pemerintahan SBY dengan tujuan untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya subsidi pemerintah setelah terjadi

²⁵ Ibid..

²⁶ Iping, B. *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif*. 2020

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak pada tahun sebelumnya. Peningkatan harga BBM diambil sebagai langkah untuk menjaga stabilitas anggaran Negara yang terdampak oleh naiknya harga minyak dunia pada saat itu.²⁷

Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi topik yang sering diperbincangkan melalui media massa, dimana program ini mendapat penilaian kurang efektif dari berbagai pihak, sehingga timbul pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa pemberian uang tunai sebesar Rp 300.000 setiap 3 bulan tidak memberikan dampak yang signifikan. Selain itu, juga dilaporkan adanya masalah dalam sistem pembayaran dan prosedur penerimaan BLT. Sebagai hasilnya, banyak perdebatan mengenai keefektifan dan kebijakan BLT ini. Selain masalah efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan pemerintah serta ketepatan sasaran, ada pihak yang menduga bahwa dana yang digunakan untuk program ini berasal dari pinjaman.²⁸

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam golongan miskin. Sebagai tanggapan, pemerintah memberikan BLT kepada kelompok masyarakat ini.

Program BLT dirancang untuk menggantikan peningkatan biaya hidup yang akan terjadi akibat kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, jumlah BLT dihitung berdasarkan peningkatan biaya hidup penduduk miskin akibat inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan program BLT, terdapat prosedur standar

²⁷ Ibid..

²⁸ Midiastuty. *Pengaruh. Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance terhadap Tindakan. Pajak Agresif*. 2016

operasional (SOP) yang harus diikuti. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, seperti pelaporan realisasi penerimaan sebelumnya, pengajuan berkas persyaratan oleh pemdes kepada pusat, pencairan dana oleh pemerintah desa dengan prosedur SPP dan kasi kaur, dan akhirnya penyaluran BLT kepada penerima. Persyaratan bagi masyarakat penerima BLT hanya membutuhkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

2.2.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kekurangan dalam segi ekonomi, materi, dan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kebutuhan non-pangan, yang tidak hanya diukur dari aspek pengeluaran. Garis kemiskinan diterapkan sebagai tolok ukur kemiskinan, terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-pangan (GKNP). GKM menetapkan batas pengeluaran minimum untuk pangan, dihitung berdasarkan kebutuhan minimal pangan sebesar 2.100 kalori per individu setiap hari, sedangkan GKNP melibatkan pengeluaran minimum untuk sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Masalah kemiskinan telah menjadi sorotan dalam perhatian global selama berabad-abad, mencakup berbagai aspek yang kompleks dan dalam, dan terus menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam penjelasan ini, kami akan menggali berbagai dimensi kemiskinan, termasuk definisi, penyebab, dampak, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang hadir dalam sejarah manusia, memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Masalah ini dianggap sebagai fenomena global yang memperoleh perhatian luas, terdapat di hampir semua negara, meskipun dampaknya dapat bervariasi. Kemiskinan berhubungan

erat dengan kemampuan individu untuk berfungsi dalam masyarakat, yang dapat timbul akibat pendapatan yang rendah, terbatasnya akses pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensional.

Hubungan kemiskinan dengan ketidaksetaraan dan kerentanan seringkali terlihat, karena individu yang mungkin tidak tergolong miskin bisa mengalami kemiskinan akibat krisis ekonomi atau penurunan harga hasil pertanian. Kerentanan merupakan aspek penting dalam kesejahteraan karena memengaruhi keputusan individu dalam hal investasi, pola produksi, strategi yang diambil, dan persepsi akan situasi mereka. Kemiskinan dapat dipahami melalui teori lingkaran setan kemiskinan, di mana ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah akan berujung pada pendapatan yang minim, yang pada gilirannya menyebabkan berkurangnya investasi dan tabungan. Penurunan pendapatan yang berkelanjutan kemudian dapat menyebabkan kemiskinan, karena sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi tidak optimal.

Penetapan standar dan kriteria pengukuran kemiskinan secara nasional di Indonesia merupakan tugas yang rumit. Dibutuhkan pendekatan yang dapat mengakomodasi beragam masalah kemiskinan, baik dari segi ekonomi, budaya, sosial, psikologis, maupun geografis. Hampir semua pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kemiskinan masih terpusat pada paradigma modernisasi yang digagas oleh Bank Dunia. Paradigma ini berakar pada teori ekonomi neoklasik dan model berorientasi produksi. Sejak pendapatan nasional (GNP) menjadi indikator pembangunan pada tahun 1950-an, para ahli sosial cenderung

mengadopsi pendekatan tersebut dalam diskusi mengenai kemiskinan di suatu negara.

Pengukuran kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh perspektif kemiskinan berbasis pendapatan, di mana pendapatan merupakan satu-satunya indikator untuk menentukan garis kemiskinan. Pada tahun 1990-an, di bawah pimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkenalkan pendekatan Pembangunan Manusia yang dirumuskan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index).

Dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia, pendekatan yang diperkenalkan oleh UNDP cenderung lebih komprehensif karena tidak hanya memperhatikan dimensi ekonomi pendapatan. Terdapat lima karakteristik utama dari penduduk miskin:

1. Mereka tidak memiliki faktor produksi yang cukup.
2. Mereka tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh aset produksi secara mandiri.
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya rendah.
4. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas yang memadai.
5. Mereka umumnya berusia muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Dalam banyak negara, terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan yang diukur dari pendapatan per kapita. Namun, manfaat dari kenaikan ini hanya dinikmati

oleh sebagian kecil masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat miskin tidak memperoleh manfaat yang signifikan, bahkan mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan beserta karakteristiknya.

Suatu keadaan disebut miskin ketika terjadi kekurangan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan ini mencakup tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dalam aspek primer dan sekunder. Aspek primer meliputi kurangnya aset pengetahuan dan keterampilan, sementara aspek sekunder meliputi kurangnya jaringan sosial, sumber daya keuangan, dan dukungan informal, seperti kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang layak, akses perawatan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang cukup.

Kelompok masyarakat miskin ini biasanya terdapat di masyarakat pedesaan dan perkotaan, dengan beragam profesi seperti buruh tani, petani kecil, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), serta pengangguran. Kelompok miskin ini dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan terkait kemiskinan kultural dan struktural, terutama jika tidak ditangani dengan serius, khususnya untuk generasi mendatang.

Penduduk yang tergolong sebagai "golongan residual" dalam kemiskinan umumnya adalah kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan secara khusus, seperti Program Indonesia Pintar, namun mungkin telah menerima beberapa program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan, Program Bimas, Program Peningkatan

Pendapatan Petani dan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi Unit Desa, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), dan lain sebagainya. Golongan ini sulit dijangkau karena memiliki kualitas sumber daya yang rendah, sehingga kurang mampu memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia, termasuk faktor-faktor produksi.

Mereka juga seringkali kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, serta kesulitan dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selain itu, perlindungan hukum atau perundang-undangan seringkali tidak cukup memihak mereka, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengakses hak-hak dan layanan yang seharusnya mereka terima.

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, dan seringkali penyebabnya saling terkait dan saling memperkuat. Beberapa faktor utama penyebab kemiskinan antara lain:

1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan pembagian sumber daya yang tidak merata, dengan sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar kekayaan sementara sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan.
2. Ketidakstabilan Ekonomi: Krisis ekonomi, resesi, dan fluktuasi pasar dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, inflasi harga barang, dan kerugian ekonomi lainnya yang memperburuk kondisi kemiskinan.
3. Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan: Ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dapat membatasi peluang kerja dan penghasilan

yang layak, memperpanjang lingkaran kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Kurangnya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan yang besar.
5. Diskriminasi dan Marginalisasi: Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisitas, agama, atau kondisi sosial-ekonomi dapat membatasi akses terhadap kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya, menyebabkan kemiskinan yang terus-menerus.
6. Kurangnya Kesempatan Kerja yang Layak: Tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan kaum muda dan kelompok rentan lainnya, dapat menyebabkan kemiskinan karena kurangnya penghasilan yang stabil.
7. Kerusakan Lingkungan: Perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan lainnya dapat merusak sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di daerah pedesaan, meningkatkan risiko kemiskinan.

Dampak Kemiskinan:

1. Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan seringkali merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak utama kemiskinan antara lain:
2. Kesehatan yang Buruk: Kemiskinan seringkali berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, karena mereka mungkin tidak mampu membeli makanan bergizi, mendapatkan perawatan medis, atau tinggal di lingkungan yang sehat.

3. Pendidikan yang Terbatas: Kemiskinan dapat menghambat akses terhadap pendidikan berkualitas, membatasi peluang untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan.
4. Perumahan yang Tidak Layak: Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tinggal di perumahan yang tidak layak, termasuk rumah-rumah kumuh, yang dapat meningkatkan risiko penyakit dan kecelakaan.
5. Ketidaksetaraan dan Ketegangan Sosial: Kemiskinan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, karena individu dan kelompok yang miskin mungkin merasa terpinggirkan dan tidak diakui oleh masyarakat yang lebih makmur.
6. Siklus Kemiskinan yang Terus-Menerus: Kemiskinan dapat menjadi siklus yang sulit diputus, karena anak-anak dari keluarga miskin mungkin menghadapi kesulitan yang sama dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja yang layak seperti orang tua mereka.

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan penting bagi pemerintah dan organisasi internasional di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, termasuk:

1. Pengembangan Ekonomi: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
2. Program Bantuan Sosial: Program bantuan sosial, seperti tunjangan keluarga, program makanan, dan program kesehatan, dapat membantu individu dan keluarga yang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dan membuka peluang kerja yang lebih baik bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan.
4. Perlindungan Lingkungan: Upaya untuk melindungi lingkungan dan memprom



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yang diteliti di lapangan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara tersebut kemudian dijadikan data utama yang dianalisis secara kualitatif, dengan menggabungkan data-data lapangan yang berupa kata-kata atau kalimat menjadi data yang bersifat ilmiah.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam implementasi BLT terhadap masyarakat miskin.

3.3. Lokasi Penelitian

Tujuan dari menentukan lokasi penelitian adalah untuk membatasi cakupan penelitian dalam pembahasan yang sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti, sambil memperjelas fenomena tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dijalankan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pidie, mengingat masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait distribusi dana bantuan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal dan kesepakatan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian seperti individu, kelompok, dan organisasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan, pemberitaan media massa, atau hasil dari pihak lain yang digunakan oleh lembaga lain dan bukan pengelolanya, namun dapat dimanfaatkan dalam penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari situs resmi institusi yang menjadi referensi penelitian, serta dari buku, jurnal, ebook, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian mengenai implementasi bantuan tunai terhadap masyarakat miskin.

3.5. Informan Penelitian

Tabel 3. 1 Tabel informan

No	Informan	Jumlah
1	Perangkat desa	3
2	Masyarakat penerima BLT	5

Dengan adanya informan tersebut, diharapkan mereka dapat memberikan informasi seakurat mungkin kepada peneliti. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti penentuan sumber data mempertimbangkan kriteria tertentu secara selektif, bukan dipilih secara acak. Teknik ini memilih informan dengan memperhatikan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian secara sinkron, sesuai dengan pokok masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling mendasar dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan berkualitas. Tanpa memahami teknik-teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian sangatlah penting.²⁹ Ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing, dan pemilihan teknik yang tepat bergantung pada sifat dan tujuan penelitian:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan teknik lainnya. Hal ini karena observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap individu, tetapi juga terhadap objek alam lainnya. Observasi biasanya dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan situasi permasalahan yang diteliti. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, observasi juga memungkinkan

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan tanpa adanya distorsi atau bias yang mungkin timbul dalam wawancara.³⁰

2. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang mendalam dan detail mengenai suatu topik. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan antara peneliti (pewawancara) dengan responden (terwawancara) dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara biasanya digunakan pada tahap awal penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Kelebihan utama dari wawancara adalah kemampuannya untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau klarifikasi secara langsung kepada responden³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai jenis dokumen atau catatan sebagai sumber informasi. Jenis dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi sering digunakan ketika peneliti ingin memperoleh data historis atau data yang sudah ada sebelumnya. Salah satu keunggulan utama dari teknik dokumentasi adalah efisiensi waktu dan tenaga, karena peneliti hanya perlu mengumpulkan dan

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, hal.165

³¹Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

menganalisis dokumen yang sudah ada, tanpa perlu melakukan interaksi langsung dengan responden.³²

3.7. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan tahap penting dalam penelitian, di mana peneliti melakukan pemilihan, penyaringan, abstraksi, dan transformasi terhadap data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Proses ini tidak hanya terjadi pada satu titik dalam penelitian, tetapi berlangsung sepanjang proses penelitian, dari awal hingga akhir. Reduksi data memiliki beberapa fungsi yang krusial, di antaranya adalah mengelompokkan data, mengarahkan fokus penelitian, memperjelas informasi yang relevan, menghilangkan data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data sehingga interpretasi yang tepat dapat ditarik.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam berbagai format, seperti teks naratif, matriks, jaringan, atau diagram. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis data, serta membantu peneliti dalam menarik kesimpulan. Dalam penyajian data, informasi yang serupa akan dikelompokkan menjadi satu atau beberapa kategori, yang kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan interpretasi.

³²Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, di mana peneliti melakukan analisis lebih mendalam untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan awal berdasarkan data yang telah disajikan. Namun, kesimpulan awal tersebut bersifat sementara dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi valid jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten yang ditemukan selama proses penelitian dilakukan di lapangan. Jika tidak ada bukti yang mendukung atau jika terdapat bukti yang menentang kesimpulan awal, maka kesimpulan tersebut harus direvisi atau diperbarui sesuai dengan temuan baru yang ditemukan. Dengan demikian, proses menarik kesimpulan atau verifikasi menjadi tahap penting dalam memastikan kevalidan hasil penelitian.



BAB IV

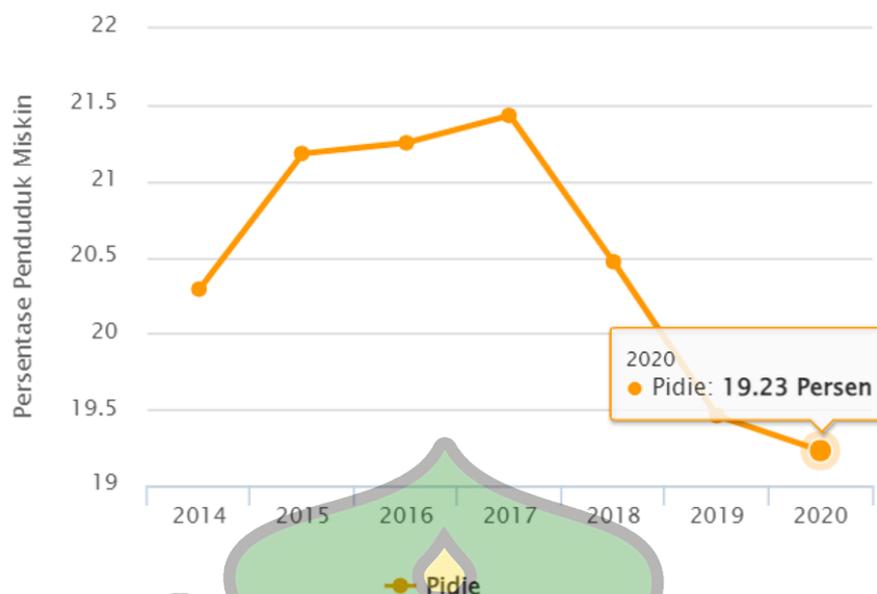
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PIDIE

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pidie terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan ibu kota kabupaten di Sigli. Kabupaten ini berada di bagian utara Pulau Sumatera dan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar di sebelah barat, Kabupaten Bireuen di sebelah timur, Kabupaten Aceh Timur di sebelah selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pidie sebanyak 447.853 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 174 jiwa/km². Mayoritas penduduk Kabupaten Pidie adalah suku Aceh dan mayoritas memeluk agama Islam.

Pekerjaan penduduk di Kabupaten Pidie cenderung mencerminkan beragam sektor ekonomi. Pertanian tetap menjadi salah satu pilar utama, dengan banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan pertanian seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan usaha pertanian lainnya. Seiring dengan itu, sektor industri juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan lapangan pekerjaan, melibatkan penduduk dalam berbagai peran, mulai dari operator mesin hingga teknisi. Di samping itu, perdagangan dan jasa mungkin menjadi sektor pekerjaan yang signifikan, dengan peluang kerja di toko-toko, pasar, dan berbagai layanan jasa. Kondisi pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan global serta kebijakan pemerintah daerah.



Gambar 4. 1. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pidie tahun 2014-2020³³

Dalam gambar 4.1 terlihat bahwa kondisi penduduk miskin menurun sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sekitar 2%. Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Pidie mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, infrastruktur yang terbatas, serta tergantungnya sebagian besar penduduk pada sektor pertanian dapat menjadi kontributor utama kemiskinan. Selain itu, faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas pertanian juga dapat memberikan dampak signifikan.

4.2. Deskripsi Responden

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, responden diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal penelitian. Penelitian ini menggunakan responden dengan kriteria tertentu, dan diwawancarai

³³ Badan Pusat Statistik. 2023. Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Pidie 2014-2023. Aceh: Badan Pusat Statistik

dengan masing-masing pertanyaan yang sesuai dengan jabatan dan posisi responden. Adapun responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1. Deskripsi Responden Perangkat Desa

No	Nama	Jenis kelamin	Status	Asal
1	Zulkifli	Laki-laki	Kepala desa	Desa Padang
2	Azhar Rusli	Laki-laki	Kepala desa	Desa Seukeum Bambong
3	Zulkarnaini	Laki-laki	Kepala desa	Gampong Blang Paseh

Tabel 4. 2. Deskripsi Responden Masyarakat

No	Nama	Jenis kelamin	Status	Asal
1	Syafrizal	Laki-laki	Masyarakat penerima BLT	Desa Seukeum Bambong
2	Munandar	Laki-laki	Masyarakat penerima BLT	Gampong Blang Paseh
3	Mahdi	Laki-laki	Masyarakat penerima BLT	Desa Padang
4	Mursalin	Laki-laki	Masyarakat penerima BLT	Gampong Blang Paseh
5	Ridwan	Laki-laki	Masyarakat penerima BLT	Desa Padang

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4. 2 yang menunjukkan bahwa responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini 100% diisi oleh laki-laki yang memiliki status 3 orang kepala desa dan 5 orang sebagai masyarakat yang menerima BLT. Penelitian ini mengambil 8 orang responden yang berasal dari 3 desa, yaitu Desa Padang, Desa Seukeum Bambong dan Gampong Blang Paseh yang berada pada Kabupaten Pidie.

4.3. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Di Kabupaten Pidie, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses implementasi dimulai dengan identifikasi calon

penerima manfaat melalui data yang terverifikasi secara cermat. Tim yang terlibat dalam pelaksanaan program melakukan survei dan validasi lapangan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan secara nyata. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Zulkilfi selaku perangkat desa yang mengatakan bahwa:

“Dibuat dulu musyawarah desa dulu, dengan mendengar suara dari masyarakat.”

Setelah identifikasi, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama, dengan menyelenggarakan pertemuan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kriteria seleksi dan mekanisme penyaluran BLT. Selain itu, dibentuklah mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana BLT disalurkan secara efisien dan tepat sasaran. Tepat sasaran dalam artian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima merupakan orang yang benar-benar berhak dalam menerima bantuan BTL, hal ini juga diutarakan oleh Azhar Rusli yang menjabat sebagai kepala desa yang mengutarakan bahwa:

“Sebelum masuk ke pembagian, adanya proses penetapan dimana tujuan ini untuk menyeleksi siapa yang berhak menerima bantuan ini, sehingga pada tahun ini melalui rapat dari para perangkat desa ditetapkan ada 3 golongan yang berhak menerima bantuan yaitu pertama lansia KK tunggal, warga yang memiliki penyakit kronis bertahun, dan warga yang memiliki penyakit distabilitas. Untuk tahun ini Blang Paseh menetapkan 52 orang penerima manfaat yang mendapatkan dana 300 ribu per bulan.”³⁴

Pelaksanaan BLT di Kabupaten Pidie juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pemantauan dan pelaporan. Pihak pemerintah daerah

³⁴ 6 September 2023

berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai forum partisipatif, termasuk pertemuan kelompok diskusi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai program ini. Para masyarakat yang ikut berperan aktif dalam program ini turut memudahkan pengurus BLT dalam membuat list atau calon penerima. Program ini tentu saja memiliki syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh penerima. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Zulkarnaini yang menjabat sebagai kepala desa, responden mengatakan bahwa:

“Kami melakukan rapat internal bersama perangkat-perangkat lainnya untuk menetapkan siapa yang berhak sebagai penerima”³⁵

Menurut hasil wawancara, diketahui bahwa penetapan penerima tidak ditentukan dengan semena-mena, penentuan penerima sudah disepakati baik dari internat pemangku jabatan maupun masyarakat sekitar. Namun beberapa daerah juga memiliki kriteria sendiri dalam menentukan kelayakan penerima, sebagaimana yang terjadi pada daerah Gampong Blang Paseh, Zulkarnaini mengatakan bahwa:

“Kami melakukan dengan membuat evaluasi terhadap masyarakat yang memang pantas untuk mendapatkan dana BLT ini, evaluasi dilakukan dengan sebenar-benarnya terhadap masyarakat yang miskin ekstrim, lansia dan yang menurut kami pantas untuk mendapatkan BLT ini”

Lain hal dengan penetapan kriteria yang dilakukan oleh Gampong Padang, dimana hasil wawancara dengan Zulkifli menunjukkan bahwa:

“Diutamakan lansia, disabilitas dan yang memang membutuhkan. Namun ini memang ada seleksi ketat”³⁶

³⁵ 6 September 2023

³⁶ 6 September 2023

Seperti yang ditunjukkan dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa setiap daerah memiliki kriteria yang berbeda. Gampong Blang Paseh, sebagai contoh, lebih mengutamakan masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrim, lansia, dan mereka yang menurut kami pantas untuk mendapatkan BLT. Di sisi lain, Gampong Padang memberikan prioritas kepada lansia, individu dengan disabilitas, dan mereka yang memang secara jelas membutuhkan bantuan ini. Perbedaan kriteria ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi kebutuhan khusus setiap komunitas lokal, menggambarkan pendekatan yang lebih sensitif dan responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, terlihat bahwa implementasi BLT tidak bersifat seragam di seluruh kabupaten, namun lebih bersifat terkontekstual dan teradaptasi untuk memastikan manfaat yang optimal bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya.

4.4. Kendala Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Hasil wawancara dengan berbagai responden menggambarkan variasi pandangan terkait kendala dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagian responden menyatakan bahwa secara langsung, belum ada kendala yang mencolok dalam pelaksanaan BLT. Namun, mereka menyoroti adanya tantangan yang muncul dari keluhan masyarakat terkait keputusan penetapan penerima bantuan. Masyarakat kadang merasa tidak puas dengan kriteria seleksi yang dianggap kurang adil, menyebabkan ketidaksetujuan dalam penentuan penerima manfaat. Keluhan ini mencakup pandangan bahwa beberapa individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan merasa dirinya lebih pantas, dan

hal ini dapat menciptakan ketegangan di tingkat komunitas. Hasil ini dibuktikan dari wawancara terhadap Mahdi yang mengatakan bahwa:

“Kendala secara langsung belum ada, tapi lebih sering kepada keluhan masyarakat yang tidak terima dengan keputusan penetapan penerima ini, masyarakat menganggap bahwa dirinya lebih pantas karena juga kurang mampu dan alasan lainnya.”³⁷

Di sisi lain, ada juga responden yang menyatakan tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan BLT sampai saat ini. Mereka menekankan bahwa proses pelaksanaan masih mencapai tujuan yang diinginkan dari program ini. Namun, pandangan ini tidak bersifat merata, dan beberapa responden lebih skeptis terhadap klaim ketiadaan kendala, mengingat kompleksitas dinamika masyarakat dan kebutuhan yang beragam. Hasil ini dibuktikan dari wawancara terhadap Syafrizal yang mengatakan bahwa:

“Tidak ada kendala sampai sekarang, proses tetap sampai kepada tujuan dari BLT ini dibuat.”

Sebaliknya, beberapa responden lain menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada kendala dalam implementasi Program BLT yang dilakukan. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa program tersebut berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Meskipun demikian, perbedaan persepsi ini menunjukkan kompleksitas dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak Program BLT, serta pentingnya memahami beragam pandangan masyarakat terhadap program bantuan tersebut.

4.5. Manfaat dan Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Manfaat dan dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikaji melalui hasil wawancara dengan berbagai responden yang mewakili

³⁷ 7 September 2023

beragam pandangan masyarakat. Pengumpulan data ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana program ini berdampak secara langsung pada kehidupan masyarakat penerima manfaat. Beberapa responden menyampaikan bahwa BLT memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatasi kesulitan ekonomi sehari-hari. Munandar menyebutkan bahwa program ini menjadi penopang utama keluarganya yang sedang mengalami krisis keuangan. Bantuan tunai yang diterima memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, BLT dianggap sebagai *lifeline* yang membantu keluarga-keluarga rentan bertahan di tengah tekanan ekonomi yang meningkat. Hasil tersebut dibuktikan dengan wawancara terhadap responden yang mengatakan bahwa:

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar harian”³⁸

Namun, pandangan positif ini tidak selalu merata di semua lapisan masyarakat. Beberapa responden menyampaikan bahwa manfaat BLT dirasakan secara tidak merata, dengan sebagian masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu responden menyoroti bahwa kriteria seleksi yang kompleks kadang-kadang menyebabkan kelompok tertentu terabaikan, meskipun sebenarnya mereka juga berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Dalam hal ini, perlu ada perhatian lebih terhadap penyempurnaan sistem identifikasi penerima manfaat untuk memastikan keadilan distribusi bantuan.

Sementara itu, beberapa responden mengungkapkan dampak positif jangka panjang dari BLT, terutama dalam hal peningkatan akses pendidikan. Bantuan

³⁸ 7 September 2024

tunai ini memungkinkan beberapa keluarga untuk membayar biaya pendidikan anak-anak mereka yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan finansial. Sebuah jawaban mencerminkan bahwa ada peningkatan partisipasi sekolah di tingkat lokal, menciptakan peluang pendidikan yang sebelumnya sulit diakses oleh anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah. Hasil ini dibuktikan dengan wawancara terhadap Ridwan yang mengatakan bahwa:

“BLT ini sangat membantu saya untuk membiayai pendidikan anak, dulu atribut sekolah anak banyak tidak bisa saya penuhi akibat finansial yang terkendala, namun sekarang dengan BLT saya sangat terbantu”³⁹

Selain itu, beberapa responden menyoroti dampak positif BLT dalam meningkatkan akses kesehatan masyarakat. Bantuan tersebut memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan. Sebuah jawaban menekankan bahwa kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin, terutama bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya sulit membayar biaya perawatan medis. Meski begitu, tidak dapat diabaikan bahwa masih ada tantangan terkait dengan penyaluran dana BLT. Beberapa responden menyampaikan bahwa terkadang terjadi keterlambatan dalam distribusi dana, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan penerima manfaat. Dampak ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang kontraproduktif terhadap tujuan program.

Sejumlah responden juga mengutarakan dampak positif sosial dari BLT. Bantuan tunai dianggap sebagai penyemangat bagi masyarakat, menciptakan rasa solidaritas dan membantu mengurangi ketegangan sosial. Sebuah jawaban menunjukkan bahwa BLT menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis, dengan

³⁹ 9 September 2023

masyarakat saling mendukung satu sama lain di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi. Hasil ini dibuktikan dengan wawancara terhadap Mursalin yang mengatakan bahwa:

“Disini rata-rata penduduk kurang mampu, namun masih bisa bekerja jadi untuk saling membantu masalah keuangan agak sulit, namun dengan adanya BLT ini yang benar-benar butuh sudah terbantu dan kami menjadi tenang dan tidak terlalu terbebani dengan masalah keuangan tetangga kami yang lebih sulit karena sudah menjadi penerima BLT”⁴⁰

Hasil ini menunjukkan bahwa program BLT sudah berperan sangat baik dalam masyarakat sekitar dan upaya-upaya perangkat desa dalam mengatur sudah sangat mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi.

4.6. Penilaian Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dari sudut pandangan masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat bervariasi. Sebagian besar masyarakat menyambut baik program ini sebagai upaya konkret pemerintah dalam membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Bantuan langsung ini dianggap sebagai jalan keluar yang signifikan untuk mengatasi kesulitan finansial sehari-hari, terutama oleh kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia, disabilitas, dan keluarga miskin. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mursalin selaku penerima BLT yang mengatakan bahwa:

“Program ini cukup baik dan sangat membantu”⁴¹

Namun, pandangan positif ini tidak selalu merata di seluruh lapisan masyarakat. Beberapa individu mungkin memiliki ketidakpuasan terkait kriteria seleksi atau jumlah bantuan yang diterima. Keterbatasan alokasi anggaran

⁴⁰ 7 September 2023

⁴¹ 7 September 2023

seringkali menjadi faktor yang membatasi cakupan BLT, sehingga tidak semua yang membutuhkan dapat terakomodasi. Selain itu, ada pula pandangan skeptis di kalangan masyarakat yang meragukan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi penerima manfaat.

Meskipun demikian, keseluruhan, sebagian besar masyarakat mengakui nilai positif dari Program BLT sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan membantu mereka mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Untuk meningkatkan efektivitas dan meredakan ketidakpuasan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program menjadi krusial, seiring dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan BLT.

4.7. Harapan Masyarakat Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Penelitian ini menggali harapan masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui hasil wawancara dengan berbagai responden. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui pandangan dan harapan masyarakat terkait BLT. Salah satu responden menyampaikan harapannya terkait peningkatan dana bantuan atau durasi bantuan yang dapat dipercepat. Hasil ini dibuktikan dengan wawancara terhadap Mursalin yang mengatakan bahwa:

“Keinginan masyarakat pasti ada untuk peningkatan yang lebih baik, baik itu tergantung bagaimana keputusan pemerintah, masyarakat hanya bisa menerima namun yang diharapkan mungkin ada peningkatan dana bantuan atau durasi bantuan yang dapat dipercepat tidak selama 3 bulan sekali, karena kami yang petani-petani ini kadang kesulitan jika panen tidak mencukupi atau memberikan hasil.”⁴²

⁴² 7 September 2023

Menurutnya, keputusan pemerintah menjadi penentu utama, namun masyarakat merasa bahwa ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan jumlah bantuan atau mempercepat frekuensi penyaluran. Petani yang menjadi responden mengungkapkan kesulitan mereka ketika hasil panen tidak mencukupi, sehingga meminta agar program ini lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

Hasil wawancara lain juga mencerminkan keragaman harapan masyarakat terhadap BLT. Sebagian responden menginginkan penyediaan bantuan yang lebih terfokus pada kebutuhan pokok, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Mereka berharap agar BLT tidak hanya bersifat sekadar bantuan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih konkret terhadap kehidupan sehari-hari. Hasil ini dibuktikan dengan wawancara terhadap Ridwan yang mengatakan bahwa:

“Harapan kami juga besar untuk bantuan pendidikan anak kami dan pokok lainnya, melihat biaya pendidikan dan kehidupan sekarang semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan atribut anak, jadi kami sebagai masyarakat kecil merasa kesulitan”⁴³

Beberapa responden juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan, agar masyarakat dapat memantau dan memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkannya tanpa adanya penyelewengan atau ketidakjelasan.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi Program BLT juga menjadi sorotan dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap Mahdi yang mengutarakan bahwa:

⁴³ 9 September 2023

“Semoga kedepannya tidak hanya perangkat desa yang menjadi penentu utama penerima BLT, kami sebagai masyarakat yang lebih paham bagaimana kami menjalani hidup juga ingin dilibatkan, meski kadang saya tahu dana tidak cukup, namun sayang tetangga kami yang kami rasa berhak menerima namun tidak mendapatkan apa-apa”⁴⁴

Sebagian responden berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat. Mereka berharap adanya mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam menentukan kebijakan dan kriteria penerima bantuan. Hal ini dianggap dapat meningkatkan legitimasi program dan membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks peningkatan efektivitas Program BLT, sejumlah saran juga diajukan oleh responden. Salah satu saran yang muncul adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sehingga ketidaktahuan informasi lapangan yang tidak dirasakan oleh pihak-pihak tertentu dapat dirasakan secara langsung. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pemangku jabatan untuk dapat lebih peduli terhadap rakyat kecil yang memang membutuhkan dari pada menganggarkan dana untuk hal yang dapat ditunda.

4.8. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian ini, implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pidie menunjukkan upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses identifikasi penerima manfaat yang melibatkan musyawarah desa dan validasi lapangan menunjukkan pendekatan partisipatif dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dijaga

⁴⁴ 7 September 2023

melalui pertemuan publik dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Program ini memperhitungkan kebutuhan khusus setiap desa, menunjukkan responsivitas terhadap dinamika lokal.

Meskipun demikian, terdapat variasi dalam kriteria penetapan penerima manfaat antar desa, mencerminkan keberagaman pendekatan yang sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi setempat. Kendala yang muncul melibatkan keluhan masyarakat terkait seleksi penerima, menggambarkan tantangan dalam menjaga keadilan distribusi bantuan.

Dampak positif Program BLT tercermin dalam kesejahteraan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan ikatan sosial di masyarakat. Namun, tantangan seperti keterlambatan penyaluran dana dan perbedaan persepsi masyarakat mengenai kendala program menunjukkan aspek yang perlu perhatian lebih lanjut.

Harapan masyarakat terhadap program mencakup peningkatan dana bantuan, peningkatan frekuensi penyaluran, dan fokus pada kebutuhan pokok. Sebagian masyarakat juga berharap adanya partisipasi lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait program. Saran untuk peningkatan koordinasi antarpihak terkait dan penggabungan masukan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi juga diutarakan.

Secara keseluruhan, Program BLT di Kabupaten Pidie memiliki dampak positif yang signifikan, namun perlu perhatian lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang dapat meningkatkan efektivitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Pidie melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin. Sistem pemantauan yang efektif diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan mencapai sasaran yang tepat, sementara evaluasi berkala dilakukan untuk menilai dampak program terhadap tingkat kemiskinan. Melibatkan partisipasi masyarakat dan menyediakan informasi publik adalah bagian penting dari implementasi, sementara penyesuaian dan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan Program BLT di Kabupaten Pidie.
2. Pada umumnya, implementasi program bantuan seperti BLT seringkali dihadapi oleh beberapa kendala. Beberapa masalah yang mungkin muncul termasuk kesulitan dalam identifikasi penerima manfaat yang tepat, risiko penyalahgunaan dana, dan tantangan logistik dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, perubahan situasi ekonomi atau kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut. Mungkin ada juga masalah transparansi atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan tersebut.

3. Sulit untuk memberikan informasi aktual tanpa pembaruan terbaru, tetapi idealnya, program bantuan seperti BLT memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, hasilnya dapat bervariasi tergantung pada efektivitas pelaksanaan program, pengawasan, dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi nasional atau lokal.

5.2. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini yang dapat direkomendasikan adalah:

1. memfokuskan penelitian pada analisis efektivitas implementasi Program BLT di Kabupaten Pidie. Evaluasilah sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meninjau kembali dampak program secara lebih mendalam, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
3. Lakukan kajian komparatif dengan program serupa di daerah lain untuk mengevaluasi perbedaan, keberhasilan, dan hambatan yang mungkin terjadi.
4. Libatkan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, dalam proses penelitian untuk memastikan keakuratan dan relevansi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumdani. 2021. *Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembeng Kabupaten Siduwardjo*. Jawa timur. Fisip upn.
- Arumdani. 2021. *Efektifitas program bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid di kabupaten kotawaringin barat provinsi kalimantan tengah*. Kalimantan Tengah. Program Studi Keuangan Daerah
- Anggraini Trifena. 2020. *Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar
- Asmaroini, A. P. 2012. *Efektivitas Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kampung Idiot Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, Universitas Negeri Malang
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Pidie 2014-2023*. Aceh: Badan Pusat Statistik
- Baria Kahirul. 2019. *Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (C. Q. Press (ed.))
- Iping, B. 2020. *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *Voll, No.1:516-526*. A R - R A N I R Y
- Hasbii, I., 2008. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Ilmu Administrasi Konsentrasi : Magister Administrasi Publik*
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100
- Lasewengan Lisbeth. 2020. *Dampak Bantuan Pkh Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanae Kota Manado*. Manado
- Maun, C. E. F. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad*

Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.

Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.28

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*

Novianto, E. 2008. Persepsi Masyarakat Tentang Subsidi Langsung Tunai (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan Di Kel. Bukit Biru Kec. Tenggara). *Jurnal JEMI, Vol8, No.2:43-57*

Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. 68 Bandung.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hal.308

Selviana. 2016. Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol3, No.2:126-135*.

Sudirman. 2019. Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai Di Desa Alo'o Dan Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Desa Pegunungan Dan Desa Pesisir). *E-Jurnal Katalogis, Vol2, No.7:132-139*

Widodo, J. 2011. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Alfabeta

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK (Surat Keputusan) Petunjukan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 846/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **20 Maret 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara

1. Dr. Abdullah Sani, MA Sebagai pembimbing I
2. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi:

Nama : Fadhullah
NIM : 170801061
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Pidie)

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 April 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN,


MUJI MULYA

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Fadhlullah
 NIM : 170801061
 Tempat, Tanggal Lahir : Desa Padang, 17 Desember 1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Blang paseh, Kecamatan kota sigli,
 Kabupaten Pidie

B. Jenjang Pendidikan

SD : SDN Min Kota Sigli
 SLTP : MTSS Ummul Ayman Samalanga
 SLTA : SMA N 2 Sigli
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Islam Negeri Ar-Raniry

C. Nama Orang Tua

Ayah : Ihsan
 Pekerjaan : PNS
 Ibu : Badrullaili
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Blang paseh, Kecamatan kota sigli,
 Kabupaten Pidie

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Lampiran 3: Panduan Wawancara

PERANGKAT DESA

1. Bagaimana implementasi yang dilakukan terkait Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di daerah ini?
2. Bagaimana cara membuat list atau seleksi penerima yang memang sesuai dengan syarat penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
3. Apakah ada kendala dalam implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan?
4. Apakah dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat mengurangi atau membantu masyarakat miskin?
5. Bagaimana perangkat desa bisa memastikan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak membuat masyarakat bergantung?
6. Apakah perangkat desa merasa bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperlukan?

MASYARAKAT PENERIMA

1. Bagaimana anda menilai bahwa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat memenuhi kebutuhan anda?
2. Apakah dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) anda merasa terbantu?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang anda rasakan?
4. Apa saja manfaat dan dampak yang anda rasakan sejak menerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
5. Apakah ada saran untuk dapat meningkatkan efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
6. Bagaimana anda memandang peran perangkat desa dalam pelaksanaan Program BLT di desa anda? Apakah perangkat desa memberikan dukungan yang cukup terhadap masyarakat penerima manfaat?

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi bersama responden yang menjadi populasi dalam penelitian

